

**KONSTRUKSI IDENTITAS NASIONAL DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI
TURKI ERA RECEP TAYYIP ERDOGAN: INTERVENSI MILITER *OLIVE
BRANCH* TURKI DI SURIAH TAHUN 2018**

Rahmatul Amalia Nur Ahsani

071511233072

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Email: rhmamalia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang intervensi militer Turki ke Suriah pada 2018, khususnya di wilayah Afrin. Wilayah Afrin sendiri merupakan salah satu bagian dari wilayah otonomi sayap politik kelompok Kurdi PYD (*Democratic Union Party*). Otonomi tersebut diberikan oleh rezim Bashar Al Assad karena peran kelompok bersenjata Kurdi, YPG (*People's Protection Unit*) dalam melawan ISIS (*Islamic State of Iran-Syria*) dan berhasil merebut kembali wilayah yang diduduki oleh ISIS di Suriah. Tidak hanya itu, kelompok PYD telah mampu untuk mendirikan sebuah sistem administrasi sendiri di tengah instabilitas keamanan dan politik Suriah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Januari 2018 Turki meluncurkan serangan udara sebagai ultimatum dilakukannya intervensi dengan nama "Operasi *Olive Branch*" di wilayah Afrin. Sikap Turki tersebut menjadi perhatian besar dalam tingkat internasional karena Turki yang membawa alasan *self-defense* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan tertulis *self-defense* memenuhi pre-kondisi *self-defense* International Court Justice dan mengabaikan Resolusi DK PBB. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi sikap Turki ke Suriah melalui perspektif konstruktivisme. Peneliti menggunakan penjelasan mengenai hubungan "self-other" dan identifikasi Turki sebagai "self" terhadap dirinya sendiri melalui pembahasan politik domestik dan politik memori. Temuan peneliti yaitu pertama, hubungan *othering* Turki terhadap kelompok Kurdi menyebabkan Turki memandang gerakan YPG sebagai suatu ancaman dan intervensi merupakan cara Turki dalam merespons gerakan kelompok bersenjata Kurdi yang sesuai dengan interaksi Turki dengan Kurdi Turki. Kedua, intervensi Turki merupakan bagian dari politik memori Turki untuk mekonstruksi neo-Ottomanisme yang baru yang mengimplikasikan Turki yang (1) memimpin *Muslim world* (2) penanggung jawab keamanan negara-negara yang merupakan bagian dari Imperium Ottoman (3) berani melawan ancaman "kekuatan eksternal" (4) menjauh dari Barat.

Kata kunci: Turki, Afrin, Kurdi, Intervensi, YPG, *self-other*

Pendahuluan

Kebijakan luar negeri Turki sejak masa pemerintahan AKP tahun 2002 didasarkan pada Doktrin Strategic Depth yang diinisiasi oleh Ahmed Davutoglu, penasihat kebijakan luar negeri Turki pada masa Perdana Menteri Erdogan, Menteri Luar Negeri Turki tahun 2009-2014, serta perdana menteri pada 2014 hingga Mei 2016. Konsep *Strategic Depth* menjadi panduan utama atau *theoretical background* bagi pemerintah Turki untuk menjalankan kebijakan luar negeri Turki yang baru (Bağcı dan Açıklım 2015). Kebijakan luar negeri tersebut berintikan “*zero problem with neighbours*” yaitu Turki bertujuan untuk menciptakan hubungan yang strategis dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa serta menciptakan kebijakan luar negeri yang multidimensi. Turki di bawah arahan Davutoglu dan pimpinan partai AKP, yaitu Recep Tayyip Erdogan yang sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak 2003-2014 menekankan bahwa Turki harus menciptakan posisi baru yaitu sebagai fasilitator keamanan dan stabilitas bagi negara dalam kawasan (D’ Alema 2017). Pada 20 Januari 2018 Turki melakukan intervensi militer ke wilayah selatan Suriah, yaitu Afrin yang dilakukan oleh militer Turki beserta pasukan Free Syrian Army. Intervensi militer yang dilakukan di bawah nama “Operasi *Olive Branch*” dikatakan sebagai bentuk pertahanan diri Turki terhadap ancaman gerakan terorisme di wilayah perbatasan. Operasi tersebut pada awalnya akan dilakukan secara terukur dan khusus menargetkan kelompok teroris. Akan tetapi, sikap Turki tersebut menjadi pertanyaan saat Turki di tengah-tengah prosesnya tidak mengikuti Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengatur mengenai adanya gencatan senjata serta dalam operasi tersebut terdapat korban warga sipil.

Operasi *Olive Branch* yang dikatakan menargetkan kelompok teroris tersebut terjadi di wilayah yang dikuasai oleh kelompok Kurdi Suriah, yaitu PYD, kelompok sayap politik Kurdi dan YPG, kelompok bersenjata Kurdi Suriah yang dilabeli Turki sebagai teroris. Keputusan Turki untuk menargetkan pihak yang disebut teroris tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena YPG merupakan pihak yang berperan besar dalam mengalahkan pasukan ISIS (Islamic State Iran-Syria) atau Turki menyebutnya dengan sebutan DAESH (Daarul Islam) dengan bergabung dengan Syrian Democratic Forces. Posisi YPG yang melawan ISIS dan berupaya untuk membebaskan wilayah kedaulatan Suriah merupakan langkah yang sama dengan Turki yang juga secara agresif memerangi ISIS dan membersihkan kawasan dari ISIS. Oleh karena itu, diperlukan suatu perspektif untuk menelaah dan mengeksplorasi alasan-alasan lain di balik tindakan Turki dalam menyerang Afrin.

Tulisan ini membawa perspektif konstruktivis yang secara spesifik membahas bagaimana konstruksi identitas nasional berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu

negara. Penulis melihat bahwa pembahasan mengenai aspek identitas nasional tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri Turki, di mana aspek kultural-historis serta masa lalu Turki sebagai sebuah imperium besar memengaruhi preferensi sikap Turki. Pembahasan mengenai konstruksi identitas dan pengaruhnya dalam kebijakan luar negeri dalam laporan penelitian ini dilandaskan pada teori Alexander Wendt. Wendt (1992) menegaskan bahwa identitas berperan dalam menentukan “siapa mereka” di suatu situasi serta posisi mereka dalam sebuah struktur sosial yang diperoleh dari pemahaman dan ekspektasi bersama. Pembentukan identitas merupakan sebuah proses relasional dan intersubjektif yaitu identitas terkonstruksi dari interaksi antara *self* dengan *other*. Logika yang berjalan yaitu “because we are *x*, we can or should do *y*.” “*X*” di sini merupakan klaim *self* mengenai diri mereka sendiri (Jackson dan Jones 2017).

Selain mengenai *self*, identitas juga meliputi *other* yaitu aktor lain yang berada di luar batas wilayah negara namun secara metafor dapat juga merujuk pada suatu kelompok atau komunitas yang meskipun secara fisik berada di dalam wilayah *self*. Saat aktor menyebutkan klaim “because we are *x*” dalam waktu yang sama hal tersebut selalu mengimplikasikan adanya aktor lain atau *other* yang bukan “*x*” sehingga *self* tersebut akan menyikapi *other* yang bukan *x* secara berbeda. Sikap yang selanjutnya muncul dari *self* adalah mengenai apa yang harus dilakukan terhadap *other* yang bukan *x* tersebut. Dengan kata lain, identitas menentukan preferensi sikap yang perlu dilakukan oleh negara atau kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini dalam pembahasan Wendt terkonstruksi sosial, bergantung pada bagaimana negara sebagai sebuah *self* memaknai interaksi yang telah tercipta dengan *other* (Jackson dan Jones 2017).

Penulis menilai bahwa pembahasan Wendt yang terlalu menitikberatkan pada konstruksi identitas nasional secara sistemik tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana identitas nasional Turki berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, penulis mengambil pandangan Michael N. Barnett dan Ted Hopf sebagai pelengkap atas argumentasi penulis. Barnett menekankan bahwa sistem internasional serta domestik berpengaruh dalam pembentukan identitas nasional. Negara juga mampu melakukan konstruksi identitas mereka sebelum berinteraksi dengan aktor-aktor lain dalam sistem. Pada suatu masyarakat yang bersifat plural, identitas negara dapat muncul sebagai hasil dari sebuah upaya atau perjuangan domestik berbagai kelompok yang masing-masing memiliki tuntutan sebuah identitas (Barnett, 1996). Ted Hopf yang menyebutkan bahwa identitas terbentuk tidak hanya melalui relasinya dengan *external others*, namun juga *internal others* dihasilkan dari kontestasi domestik antara elit politik yang mendefinisikan aspek identitas nasional secara berbeda (Hopf, 2002). Individu atau kelompok yang memiliki *power* dalam proses pembangunan negara (dalam konteks ini, politik domestik) akan berupaya untuk

menanamkan ide dan identitasnya masing-masing serta menginstitusionalisasikan dalam struktur legal, politik, dan sosial. Berhasil atau tidaknya upaya mereka bergantung pada kekuatan mereka dibandingkan dengan kelompok lain serta hubungan yang tercipta dengan masyarakat (Bozdaglioglu, 2003). Pada kasus Turki, kekuatan kelompok identitas terinstitusionalisasi melalui pembentukan gerakan atau partai politik. Selain aspek politik domestik, penulis mengambil aspek memori kolektif sebagai sumber konstruksi identitas nasional dalam diri *self*. Hal tersebut dikarenakan bahwa stabilitas dan kohesi suatu identitas sosial bergantung pada seberapa besar sebuah negara memegang memori kolektif. Berkaitan dengan hal tersebut, memori kolektif memberi aktor suatu gambaran mengenai peran di masa depan. Memori mengenai masa lalu kemudian dapat dijadikan sebagai validasi keputusan politik atau disebut dengan politik memori (Wang, 2018). Memori kolektif dalam sebuah *nation-state* memiliki peran mengenai bagaimana negara memandang dirinya dan lingkungan. Memori kolektif berkaitan erat dengan identitas sebagai sebuah *self-understanding* yang tidak hanya sebagai refleksi dari kepentingan namun juga faktor yang menentukan dan membentuk kepentingan tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis mengoperasionalkan konsep *othering* untuk menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara Turki dengan masyarakat Kurdi direpresentasikan oleh ancaman. Hubungan *self-other* dapat bertransformasi menjadi “othering” saat *nature of difference/identity, the social distance, dan response of other* tidak bersifat kongruen. *Nature of difference/identity* diartikan bahwa sebuah negara dapat memiliki identitas eksklusif atau identitas inklusif. Identitas eksklusif merupakan identitas dasar sebuah *self* yang secara penuh memandang *other* sebagai *non-self*. Identitas eksklusif mencakup konsepsi *difference* berdasarkan pada karakteristik inheren. Sementara identitas inklusif mencakup perbedaan yang muncul dari *acquired characteristics* (Rumelili 2004). *Difference* yang berdasar pada *acquired characteristics* dapat dipahami sebagai karakteristik negara yang tidak diturunkan secara natural (diperoleh melalui proses interaksi) serta bersifat universal. Karakteristik tersebut dapat dicontohkan seperti identitas negara sebagai negara demokratis atau otoritarian, negara berdasar pada *rule of law*, atau menjunjung kebebasan individu. Sementara karakteristik inheren lebih bersifat “mengikat” secara natural dan eksklusif, seperti identitas sebagai bangsa Eropa (karena secara geografis negara berada di wilayah Eropa. Ada atau tidaknya *othering* tergantung bagaimana kedua macam identitas tersebut berasosiasi dengan dimensi selanjutnya.

Dimensi kedua, yaitu respons *other* terhadap konstruksi identitas *self*. Spektrum respons dapat direpresentasikan dengan rekognisi dan resistensi. Respons berupa resistensi menimbulkan rasa tidak aman terhadap identitas *self* dan berupaya untuk mengamankan identitas dari *other* (Rumelili, 2004). Ketiga, *social distance* merujuk pada pemahaman

bahwa negara mengamankan identitas nasionalnya dalam hubungan internasional melalui asosiasi dengan aktor lain atau melakukan disosiasi diri mereka dari aktor lain. Negara melakukan asosiasi dengan kelompok yang melakukan rekognisi terhadap identitas. Sementara *self* melakukan disosiasi terhadap *other* yang dipandang sebagai *non-self* untuk mempertegas batasan antara *self* dan *other* (Rumelili 2004).

Konstruksi “Othering” Turki terhadap Kurdi Turki dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Turki-Suriah

Dalam pembahasan Turki sendiri, identitas eksklusif Turki secara sederhana dapat dijelaskan dalam kalimat "*Torn society, straddles Europe-Asia, in between the West and the muslim world.*" Representasi identitas tersebut menekankan bahwa Turki terletak di antara Eropa dan Asia, serta Barat dan Muslim sebagai identitas eksklusif Turki. Ahmed Davutoglu menganggap narasi tersebut cenderung merepresentasikan Turki yang pasif dan melemahkan peran Turki di kawasan Timur Tengah (Rumelili 2012). Oleh karena itu, pada masa pemerintahan AKP dan selanjutnya, Presiden Erdogan, narasi tersebut direfleksikan pada nilai neo-Ottomanisme dalam Doktrin *Strategic Depth* yang membawa Turki sebagai *role model* dalam *muslim world*. Tidak hanya itu, Revolusi Musim Semi Arab memperkaya identitas eksklusif Turki dengan identitas inklusif yang direpresentasikan dengan “Modern, medium, and moslem,” yaitu Turki sebagai negara yang mendorong nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan keadilan sosial (Tezcur 2010).

Selain itu, identitas eksklusif juga direpresentasikan dengan Turkishness yang terlihat menonjol pada periode Kemalisme. Periode Kemalisme merupakan periode pembentukan Turki sebagai sebuah negara-bangsa yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk. *Turkishness* atau Turkifikasi di bawah Ataturk mulai dapat dilihat pada periode ketiga (1930-an) Kemalisme. Terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat berdasarkan etnisitas yaitu asimilasi minoritas serta emigrasi, terdapat dalam The 1934 Resettlement Law serta The 1942 Property Tax Law (Grigoriadis 2009). Bahasa juga menjadi isu penting dalam nasionalisme etnis. Pemerintah secara sistematis menjadikan bahasa Turki sebagai kebanggaan nasional. Kampanye antiminoritas dalam penggunaan bahasa dilakukan melalui *Turkish Language Reform Program* yang bertujuan untuk memurnikan masyarakat Turki dari pengaruh Arab serta Persia dan dilanjutkan pada tahun 1937 dengan diluncurkannya kampanye “*Citizen, Speak Turkish.*” Pandangan nasionalis-Kemalisme menekankan bahwa persatuan hanya akan dapat tercapai dengan keseragaman. Pandangan tersebut menghasilkan dua isu. Pertama, segala bentuk keberagaman khususnya etnisitas dan kepercayaan menjadi aspek-aspek yang dicurigai. Publik dan institusi pemerintah Turki melihat minoritas non-Muslim sebagai elemen yang

berbahaya atau asing dalam pembentukan negara bangsa serta membahayakan trajektori dan kedaulatan teritorial Turki (Gourlay, 2018). Kedua, kecurigaan terhadap minoritas mendorong pada terbentuknya sebuah *othering*. Minoritas atau segmen dalam masyarakat Turki lainnya yang gagal untuk menyelaraskan diri mengalami marjinalisasi dan persekusi (Gourlay, 2018).

Jika ditarik mundur, pada dasarnya, *Turkishness* atau Turkifikasi telah ada sejak periode ottoman melalui adanya sistem *Millet* serta munculnya gerakan-gerakan oposisi yang menyampaikan ketidakpuasannya terhadap dampak-dampak dari modernisasi Ottoman. Sistem Millet sendiri merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk menjaga kesatuan Turki di tengah-tengah keragaman etnis dan agama. Sistem ini pada dasarnya mengidentifikasi masyarakat Ottoman berdasarkan afiliasi religius dan mencoba mengabaikan keragaman sub identitas yang ada. Sistem ini memberikan kewenangan bagi para pemimpin agama non-Muslim untuk melakukan aktivitas keagamaan serta mengatur otonominya sendiri di bawah pengawasan pusat. Kewenangan ini diberikan dengan ketentuan bahwa non-Muslim diwajibkan untuk membayar pajak atas diberikannya otonomi tersebut serta harus mematuhi panggilan wajib militer setiap dibutuhkan oleh imperium.

Selain itu, Turkifikasi yang ditimbulkan dari oposisi dapat dilihat saat munculnya gerakan *Young Turks*. Pada masa *Young Turks*, terdapat tiga identitas yang digunakan masyarakat Ottoman dalam mengidentifikasi diri mereka, yaitu selain Ottoman dan Muslim, terdapat identitas Turkisme. Meskipun *Young Turks* secara normatif mendukung Otomanisme, namun interpretasi yang terlihat lebih cenderung dilakukannya Turkifikasi terhadap seluruh aspek yang bersifat *non-Turkish* (Bozdaglioglu, 2003). Ide Turkisme dibawa dan dikembangkan oleh Ziya Gokalp yang kemudian berpengaruh terhadap ide Kemalisme. Gokalp percaya bahwa budaya Turki dan peradaban Barat tidak saling berkonflik namun budaya Turki dalam hal ini harus dimurnikan dari pengaruh buruk Islam melalui sekularisasi. Eksistensi Ottoman hanya dapat diselamatkan melalui Turkisasi, Islamisasi, dan Westernisasi (Bozdaglioglu 2003). Turkifikasi berarti pemurnian budaya Turki dari budaya dan tradisi campuran. Islamisasi yaitu reformasi dalam hal bahasa religius seperti mentranslasikan Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Sementara yang dimaksud Westernisasi adalah pandangan bahwa Turks memiliki kesesuaian dengan budaya Barat. (Bozdaglioglu 2003). Ketiga ide tersebut yang dijadikan sebagai identifikasi dan *otherness* Ottoman. Ide Ziya Gokalp inilah yang menginspirasi reformasi Kemalisme.

Lebih lanjut, Turki juga memiliki identitas inklusif yang membuat Turki melakukan *difference* berdasar pada karakteristik inheren. Identitas inklusif tersebut diturunkan dari identitas eksklusif sebelumnya mengenai posisi Turki yang unik, yaitu di antara Eropa dan

Asia, serta barat dengan *Muslim world*. Pada kekuasaan Partai pembangunan Keadilan (AKP) sejak tahun 2002 yang berlandaskan pada Doktrin *Strategic Depth*, identitas inklusif Turki dapat dilihat dari bagaimana Turki yang menjadi aktif dalam menjadi mediator serta fasilitator dalam konflik kawasan. Tidak hanya itu, Revolusi Muslim Semi Arab memperkaya identitas eksklusif Turki dengan identitas inklusif yang direpresentasikan dengan “Modern, medium, and moslem,” yaitu Turki sebagai negara yang mendorong nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan keadilan sosial (Tezcur, 2010).

Dimensi kedua, yaitu respons dari *other*. Respons *the other* pada tahap ini berpengaruh dalam menentukan apakah *difference* yang berdasarkan pada identitas inklusif dan eksklusif Turki sebelumnya mendefinisikan *the other* sebagai ancaman terhadap identitas Turki. Respons rekognisi dan resistensi dapat muncul dalam berbagai diskursus identitas dengan tingkatan dan spektrum yang bervariasi. Dalam penelitian ini, “other” merujuk pada bangsa Kurdi di Turki, kemudian secara spesifik direpresentasikan oleh Partai Pekerja Kurdi (PKK). Respons kelompok Kurdi pada masa Ottoman yang mulai terlihat signifikan dapat dilihat saat dimulainya reformasi. Reformasi yang menimbulkan sentimen dengan kelompok Kurdi ditandai dengan adanya pemberontakan Abdurrahman Pasha. Pemberontakan ini disebabkan karena kelompok Kurdi memandang pihak pemerintah melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara Sultan Salim dengan suku-suku Kurdi yaitu saat seorang kepala suku meninggal, wewenang untuk memimpin suku tersebut secara jelas diteruskan kepada anak laki-laki dari pemimpin sebelumnya sehingga kepemimpinan tetap dipegang oleh satu keluarga tertentu. Akan tetapi, sebagai bentuk dari adanya sentralisasi wilayah-wilayah di Ottoman, pihak imperium menerapkan sebuah aturan yang mengatur provinsi-provisi di imperium.

Sentralisasi yang dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap urusan kelompok Kurdi mengganggu nilai-nilai kesukuan dan lokalitas yang telah menjadi basis baik dalam bermasyarakat maupun sistem administrasi suku-suku Kurdi sehingga untuk pertama kalinya pemberontakan terhadap sentralisasi Ottoman dilakukan di bawah pimpinan Abdurrahman Pasha¹ tahun 1806 dan dikalahkan oleh Ottoman dua tahun setelahnya (Goktas, 1991). Sejak saat itu, aksi pemberontakan terhadap Ottoman menjadi tahapan yang penting dalam narasi identitas bangsa Kurdi yang baru dan terjadi di setiap periode Ottoman. Akan tetapi, kebijakan sentralisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Sultan Abdulhamid II justru mendorong dan mengaktifkan kembali kekuatan para Sufi (pemimpin

¹ Anak dari Ibrahim Pasha, pemimpin distrik Suleymaniye dari Suku Baban yang seharusnya menjadi penerus untuk memimpin wilayah tersebut, namun pihak Ottoman menunjuk Halit Pasha yang bukan berasal dari garis keluarga yang sama sebagai pemimpin yang baru.

agama) Naksibendi dan Kadiri bersamaan juga dengan *Syaikh* sebagai sosok integral yang berperan dalam menjaga persatuan di antara beragam suku di Kurdi (Yavuz, 2001).

Respons kelompok Kurdi berbentuk resistensi berlanjut hingga masa berdirinya Republik Turki tahun 1920. Pada saat ini resistensi yang ada merupakan resistensi etnis Kurdi terhadap kebijakan modernisasi Kemalisme. Pada masa awal Kemalisme, terdapat sebuah pengabaian atau penolakan dari negara terhadap eksistensi Kurdi. Pada konteks ini, *othering* Turki terhadap kelompok Kurdi sebagai salah satu “musuh internal” dilakukan dengan menciptakan Turkifikasi. Kelompok Kurdi yang memiliki perbedaan bahasa serta dipaksa untuk melakukan asimilasi di bawah satu identitas Turki seperti yang tertera dalam beberapa slogan rezim Atatürk, “*The only friends of Turks are Turks*” dan “*One party, one nation and one leader*” serta “Hanya ada satu ras di Turki, *Turks*, dan satu bahasa, yaitu bahasa Turki (White 1999).” Situasi tersebut mendorong pergolakan kelompok Kurdi dengan adanya pemberontakan kelompok Kurdi Sunni terhadap Atatürk tahun 1925 untuk pertama kalinya. Pemberontakan tersebut menjadi bagian dari memori kolektif elit pemerintahan Turki mengenai Kurdi secara umum dan *Kurdish Question* secara spesifik. Berdasarkan pada praktik-praktik yang terjadi dalam periode Kemalisme, tindakan represif Turki pada realitasnya justru menguatkan identitas yang ingin dihancurkan tersebut, yaitu identitas etnis Kurdi (Van Bruinessen 2003).

Sekularisasi dan transformasi identitas Kurdi terjadi dalam gerakan Kurdi kiri Turki secara luas pada tahun 1960-an dan 1970-an merupakan hasil dari interaksi Turki dengan ideologi sosialisme. Adanya Konstitusi 1961 menempatkan pemimpin intelektual modern sebagai tokoh yang membentuk identitas Kurdi dibandingkan dengan pemimpin suku dan agama. Tokoh intelektual Kurdi mulai menunjukkan adanya perhatian terhadap Kurdi dan menyebarkan semangat *self-determination* bangsa Kurdi. Gerakan sayap-kiri Kurdi di Turki didominasi oleh Kurdi Alevi pada tahun 1970-an dan muncul untuk mengekspresikan kesenjangan ekonomi dalam kawasan yang dalam menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi sosialisme (Yavuz 2001). Pada 1970-an kelompok serta identitas sayap-kiri dijadikan sebagai alat untuk melawan penguasa pusat. Adanya tindakan represif secara masif dari negara tahun 1980 yang bertujuan untuk mengontrol kekuatan pusat kelompok Kurdi dan gerakan-gerakan religius. Aksi represif tersebut menghancurkan kekuatan organisasional dari jaringan Kurdi di Turki dengan cara memenjarakan para aktivis dan menyebabkan sebagian lainnya mengungsi ke Eropa.

Pada tahap ini, persepsi Kurdi terhadap etnis Turki terfiltrasi melalui nasionalisme yang terinstitusionalisasi melalui munculnya PKK dan berbagai partai politik Kurdi lainnya. Pendirian PKK diawali dari aktivitas Abdullah Ocalan, pendiri organisasi Marxist yang

terdiri dari baik militan Turki maupun Kurdi untuk melakukan revolusi sosialis di Turki. Organisasi tersebut melakukan rekrutmen serta indoktrinasi para pengikutnya hingga terbentuk PKK tahun 1972. PKK di bawah Ocalan berupaya untuk menghapuskan narasi asimilasi Kurdi dengan Turki dengan cara-cara kekerasan, seperti dengan membunuh Kurdi Turki moderat dan “mereka” yang dipersepsikan sebagai *pro-state* baik yang berada di wilayah Turki maupun Eropa (Yavuz 2001).

PKK berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik bangsa Kurdi, membangun sebuah jaringan di dalam Turki untuk merekrut pasukan, melemahkan struktur kesukuan dan agama dengan menciptakan solusi atau peluang baru bagi para generasi muda kelas menengah Kurdi, serta mengonsolidasikan dan menyebarkan nasionalisme Kurdi secara lebih luas di Turki. Aktivitas PKK mendorong Kurdi tidak untuk mengkritik otoritas politik di Ankara namun terhadap nasionalisme Turki agar dapat melegitimasi semangat separatisme mereka (Yavuz 2001). Pergeseran dari sikap kritis terhadap *state power* menjadi kritis terhadap nasionalisme Turki tersebut menjadi suatu titik balik dalam pemisahan nasionalisme Kurdi dan gerakan kiri Turki. Pada 1970-an, PKK memperkenalkan dirinya sebagai sebuah gerakan pembebasan dan menyuarakan keinginan untuk mengembalikan identitas serta keadilan untuk kelompok Kurdi melalui cara-cara kekerasan. Hal tersebut disajikan sebagai respons atas isu-isu kesenjangan kelas dan permasalahan ekonomi-sosial yang dirasakan oleh para generasi muda kelompok Kurdi.

Setelah adanya tindakan opresif tahun 1980-an dari pemerintah, PKK berupaya untuk menghadirkan rasa ingin melakukan perlawanan dalam masyarakat Kurdi serta mendorong untuk memandang Turki sebagai aktor yang akan mengekang masa depan Kurdi. PKK dalam situasi tersebut menawarkan dua solusi (Yavuz 2001). Pertama, mendorong masyarakat Kurdi untuk mengungsi ke Eropa. Kedua, bergabung dengan PKK. Jika dilihat lebih dalam, resistensi berupa kemunculan dan persebaran ideologi sosialis-Marxisme tersebut merupakan dampak dari modernisasi Turki yang membawa ideologi-ideologi baru. Golongan intelektual Kurdi yang pergi ke Barat untuk studi menyebarkan semangat nasionalisme dan *self-determination*.

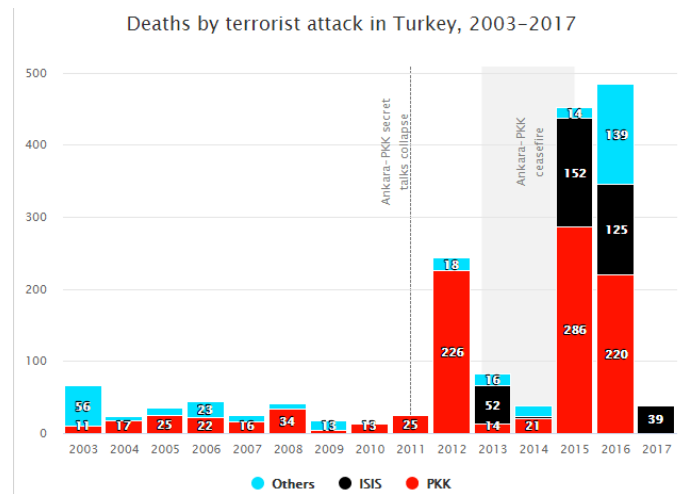
Narasi mengenai dinamika interaksi bangsa Kurdi dengan Turki sejak masa imperium Ottoman hingga penderian Republik Turki di atas berpengaruh terhadap kebijakan Turki dengan etnis Kurdi sejak pemerintahan AKP hingga saat ini. Pada tahun 2013 hingga pemilihan umum 2015 terdapat upaya dari pemerintah Turki maupun Kurdi untuk menempuh jalur damai dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun. Dalam tulisan surat Abdullah Ocalan tahun 2013, disebutkan bahwa perlu dibentuk era yang baru bagi Kurdi dan Turki sebagai dua pihak yang tumbuh bersama di seluruh kawasan

Mesopotamia. Pada realitasnya, ide tersebut gagal diimplementasikan dengan kembali terjadinya konflik yang menewaskan baik warga sipil maupun non-sipil. Pada masa kekuasaan AKP, dibentuk kebijakan *Kurdish Opening and Kurdish Resolution* sebagai rekonsiliasi antara negara dengan tokoh politik serta pasukan bersenjata Kurdi. Kebijakan rekonsiliasi tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah demokratisasi.

Perdana Menteri Erdoğan yang mulai memimpin pada 2003 menyebutkan “*In this country, we have such ethnic elements as Kurds, Lazes, Circasians, Georgians, and Albanians. These are secondary identities. We have one sin-gle primary identity; that is the citizenship of Turkish Republic* (Yavuz 2001).” Berdasarkan dua pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Turki pada awal kepemimpinan AKP membawa narasi persatuan di bawah Republik Turki dengan mengizinkan adanya perbedaan kultur, agama, serta etnis selama identitas tersebut tidak dibawa ke ruang publik. Kebijakan AKP terhadap Kurdi hingga tahun 2005 juga didasarkan pada sikap “melupakan” konflik Kurdi atau mengasumsikan bahwa tidak terjadi permasalahan antara Kurdi dengan Turki sebelumnya. Proses resolusi tersebut berlanjut dari tahun 2009 hingga Juni 2015.

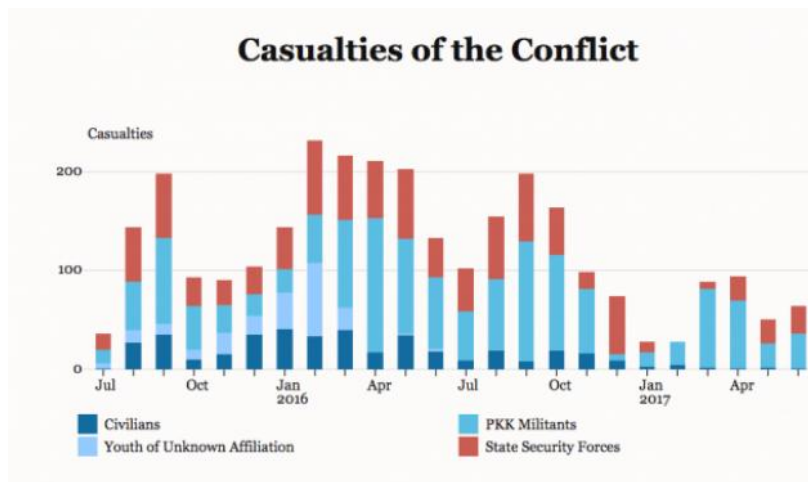
Reaksi negatif Erdogan terhadap proses resolusi tersebut terlihat sebelum pemilu Juni 2015 dan terhenti setelah hasil pemilu menunjukkan bahwa proses resolusi tersebut tidak membantu terpenuhinya agenda politik AKP. Akan tetapi, resolusi yang sebenarnya ditujukan untuk mencegah *pro-Kurdish Democratic People Party* (DPP) memperoleh kekuatan politik. PYD di Suriah di saat bersamaan semakin menguat di perbatasan Turki-Suriah sejak pasukan tentara Suriah menarik diri dari sebagian besar wilayah Kurdi di utara Suriah tahun 2012 (Bilgic 2016). Tidak hanya itu, PYD memperoleh dukungan dari aliansi Turki di NATO, AS serta memiliki hubungan diplomatik dan kerjasama militer dengan Rusia. Hal tersebut menimbulkan dilema Turki dalam melakukan sinkronisasi kebijakan domestik serta luar negeri.

Grafik 1.1 Jumlah Korban Tewas oleh Serangan Teroris di Turki tahun 2003-2017



Sumber: Data tahun 2003-2015 bersumber dari Global Terrorism Database. Tahun 2016 diambil dari kompilasi beberapa media (PRI.org)

Grafik 1.2 Tingkat Korban Konflik di Turki Tahun 2016-2017



Sumber: International Crisis Group

Penulis melihat bahwa kegagalan resolusi yang telah dibentuk tidak dapat dipisahkan karena adanya resistensi melalui gerakan PKK yang masih aktif melakukan pemberontakan selama masa resolusi tersebut. Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa berakhirnya kesepakatan gencatan senjata tahun 2015 mengakibatkan peningkatan kembali jumlah korban yang disebabkan oleh serangan dari PKK. Sementara 2 tahun sebelumnya, angka kematian cukup kecil. Kemudian, grafik 2 menunjukkan penurunan jumlah korban yang berasal dari militer Turki tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Hal ini dapat dipahami bahwa serangan yang dilakukan oleh PKK pada realitasnya justru mendorong semakin kuatnya nasionalisme

dalam masyarakat Turki (Mandıracı 2016). PKK yang memandang bahwa kelompoknya dapat melemahkan pemerintahan AKP melalui serangan bersenjata justru meningkatkan para pendukung AKP. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh AKP untuk memobilisasi dukungan dari partai-partai Kurdi yang pro-pemerintah.

Dimensi ketiga, yaitu *social distance*, penulis menemukan bahwa antara Turki dengan kelompok Kurdi Turki sebagian besar diisi oleh disosiasi. Asosiasi hanya terlihat saat Turki di bawah AKP mengakui identitas bangsa Kurdi sebagai bentuk keberagaman dan kekayaan etnis Turki. Kebijakan Turki yang aktif dalam mempromosikan perdamaian di wilayah Suriah dan negara berkonflik di Timur Tengah melalui menerima pengungsi Suriah selama Perang Sipil, dukungan terhadap perlawanan SDF (*Syrian Democratic Forces*) dengan ISIS, serta kerjasama perdagangan tidak menandakan terjadinya asosiasi Turki dengan YPG dan Suriah. Hal serupa dengan kelompok PKK, peneliti tidak melihat kesepakatan gencatan senjata tahun 2013-2015 sebagai bentuk asosiasi karena terdapat batas lingkup jelas yang diciptakan oleh pemerintah antara masyarakat Turki dengan PKK sebagai kelompok teroris. Hal ini bersifat konstitutif karena PKK juga melakukan resistensi terhadap konstruksi identitas Turki. *Social distance* yang digambarkan oleh disosiasi ditunjukkan oleh respons Turki terhadap resistensi bangsa Kurdi dalam ranah militer dan politik. Dalam ranah militer, disosiasi ditunjukkan oleh dimasukkannya isu PKK dalam kebijakan keamanan. Militer Turki tidak segan-segan memberikan tindakan represif melalui serangan militer untuk melawan gerakan PKK. Sikap Turki tersebut mendorong pada terciptanya “state of exception” yang semakin terekskalasi. Hal tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti terdapat warga sipil yang ikut menjadi korban, rusaknya bagian kota wilayah Kurdi seperti Cizre, Sur, Silopi, Idil, dan Nusyabin, serta perpindahan populasi secara terpaksa (Soguel 2016).

Disosiasi Turki terhadap kelompok PKK dapat dilihat dari pernyataan Erdogan yang dipublikan dalam laman resmi Presidency of the Republic of Turkey (2019), “*It seems that they don’t know who my Kurdish citizens are, what the YPG/PYD is or what the PKK is. The PKK terrorist organization, the PYD/YPG terrorist organization can never be a representative of my Kurdish citizens or my Kurdish brothers and sisters.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Turki mempertegas batasan lingkup identitas masyarakat Kurdi di Turki dari PKK dalam artian *social distance* yang pada awalnya telah ada, yaitu antara masyarakat Kurdi dengan Turki, menjadi dispesifikkan, yaitu Turki dengan masyarakat Kurdi yang tidak memiliki keinginan atau melakukan pemberontakan serta antara Turki dengan PKK.

Disosiasi dalam ranah politik ditunjukkan dengan adanya pelarangan pendirian partai Kurdi seperti Partai Masyarakat Demokrat (DTP) dan Serikat Komunitas Kurdistan (KCK) tahun 2009. Sejak pemilu Juni 2015, represi ditunjukkan dengan dilayangkannya tuduhan oleh Presiden Erdogan beserta AKP kepada partai pro-minoritas, Partai Demokrat Rakyat (HDP), mendukung terorisme (Bayir 2014). Pemilu 2018 yang membawa Erdogan sebagai presiden terpilih dilakukan pada masa keadaan darurat setelah terjadinya kudeta 2016 yang mengalami kegagalan dan tingginya represi media oleh pemerintah. Pemerintah menahan sejumlah jurnalis yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah terhadap kelompok Kurdi, anggota parlemen, dan kandidat presiden yang berasal dari oposisi pro-Kurdi. Hal tersebut tidak terkecuali dengan asosiasi aktivisi HAM dan warga sipil (Human Rights Watch 2019). Meskipun pada masa pemerintahan Erdogan narasi mengenai penerimaan terhadap keberagaman identitas digaungkan, realita bahwa terdapat eksklusi terhadap minoritas tidak dapat dihindari. Peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan antara eksklusi yang dilakukan oleh pemerintah Turki sebelum AKP dengan masa sekarang. Jika sebelum AKP, khususnya sebelum kebijakan *Kurdish Opening*, eksklusi bangsa Kurdi dilakukan secara menyeluruh, eksklusi pemerintahan AKP terhadap kelompok Kurdi dapat ditunjukkan dengan bagaimana AKP menyikapi partai politik pro-Kurdi dan kelompok bersenjata Kurdi, PKK. Hal tersebut juga dikarenakan narasi-narasi yang hadir mengenai nasionalisme Kurdi secara mudah dapat dilihat dari lapisan-lapisan tersebut.

Maka, dari penjelasan mengenai dimensi *nature of difference*, *response of other*, serta *social distance* di atas, analisis *othering* yang tercipta dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis *Othering* Turki terhadap Kurdi Turki

Dimensi	Spektrum
<i>Nature of Identity/difference</i>	Identitas eksklusif : menguat Identitas inklusif : menerima Insekuritas
<i>Response of other</i>	Resistensi
<i>Social distance</i>	Disosiasi ; mempertegas batasan-batasan identitas anatara keduanya.
Hasil	<i>Othering</i> dengan representasi ancaman

Sumber: Analisis Penulis

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa spektrum dalam setiap dimensi memenuhi operasionalisasi konsep *othering* dengan representasi ancaman. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perilaku *self* cenderung agresif dan hubungan yang tercipta dengan *other*, yaitu kelompok Kurdi bersifat konfliktual. Hubungan Turki-Suriah dipengaruhi oleh aktivitas YPG yang dipandang sebagai afiliasi PKK. Interaksi Turki dengan Suriah semakin menegaskan sikap yang harus dipilih Turki terhadap kelompok bersenjata Kurdi. Hal tersebut dijelaskan oleh peneliti di bagian selanjutnya.

Adanya gerakan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Suriah yang dipandang Turki memiliki koneksi dengan PKK, memengaruhi Turki dalam menentukan sikap kepada Suriah. Interaksi identitas yang terjadi yaitu antara identitas Turki sebagai bangsa besar yang mempromosikan nilai perdamaian dengan identitas YPG yang mengadopsi ideologi PKK. Ideologi tersebut menjunjung ide “otonomi demokratis” yang dikembangkan oleh pendiri PKK, Abdullah Ocalan. Meskipun begitu, PYD selalu menolak mengenai anggapan bahwa PYD terhubung secara langsung dengan aktivitas PKK. Sebaliknya, pemerintah Turki melihat bahwa kelompok bersenjata Kurdi dalam kawasan memiliki suatu jaringan yang menghubungkan satu kelompok dengan lainnya

Perjuangan masyarakat Kurdi dalam pembahasan berbagai literatur lebih cenderung diartikan sebagai *Kurdish question* serta cenderung mengabaikan arti perjuangan masyarakat Kurdi sebagai perjuangan kelompok etnis (Fadaee dan Brancolini 2019). Konsekuensi dari *Kurdish question* tersebut, perjuangan masyarakat Kurdi juga sebagian besar difokuskan dalam pemberontakan PKK melawan negara. Pada dasarnya, Ocalan sebagai pendiri PKK menawarkan solusi pendirian sebuah negara independen untuk melawan opresi. Adanya sebuah teritori di bawah kontrol Kurdi merupakan cara yang dipandang dapat melindungi hak masyarakat Kurdi. Akan tetapi, runtuhnya Uni Soviet berkontribusi pada semakin lemahnya pendekatan Marxisme-Leninisme dalam ide pembebasan yang terdapat dalam masyarakat Kurdi.

Tidak hanya itu, penahanan Ocalan tahun 1999 menyebabkan timbulnya pergeseran ide Ocalan mengenai pembebasan bangsa Kurdi yang baru (Fadaee dan Brancolini 2019). Ide ini bertumpu pada pandangan bahwa konsep negara-bangsa secara inheren bersifat anti-demokrasi, hierarkis dan berlandaskan pada represi. Sementara yang lebih diperlukan oleh bangsa Kurdi yaitu sebuah “*democratic nation*” yang berlandaskan pada *civic nationalism*. Individu dan kelompok beragam mendapatkan tempat untuk berperan dalam proses demokratisasi. “*Democratic nation*” tidak berlandaskan pada batasan dan lingkup politik, bahasa, budaya atau agama tertentu namun rekognisi terhadap setiap masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu solidaritas. Oleh karena itu, secara konsisten Ocalan menolak

pendirian suatu negara baru sebagai solusi permasalahan Kurdi dan justru mengadvokasi pembentukan sebuah bangsa yang tidak bergantung pada eksistensi negara, yaitu dengan pembentukan wilayah otonom.

PKK, sebagai salah satu bentuk perjuangan Kurdi yang berada dalam spektrum ekstrimis dengan dasar ide tersebut sebagai kelompok bersenjata berupaya untuk menuntut kekuasaan otonom dengan cara-cara kekerasan. Tuntutan untuk memberikan wilayah otonomi untuk kelompok Kurdi dipandang Turki sebagai ancaman terhadap kesatuan dan kebesaran kekuasaan Turki. YPG sebagai organisasi yang ditetapkan Turki berafiliasi dengan PKK, secara aktif mengkampanyekan ide-ide mengenai pembebasan dan pergerakan melawan opresi dan fasisme. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari cuitan akun resmi YPG Internasional. Meskipun tidak terdapat cuitan yang secara eksplisit menunjukkan dukungan YPG terhadap PKK di Turki, narasi solidaritas Kurdi dalam melawan opresi tetap terlihat dengan cuitan yang ditujukan kepada masyarakat Kurdi secara umum. Adanya akun pergerakan Kurdi seperti akun twitter *Kurdistan Solidarity Campaign* menunjukkan bahwa terdapat narasi-narasi pembebasan yang membentuk solidaritas antara kelompok Kurdi di kawasan. Saat YPG berhasil mendapatkan wilayah otonomi serta melakukan pelatihan militer di wilayah Afrin yang berbatasan dengan Turki ditakutkan dapat semakin mendorong dan menguatkan keinginan dan ide *democratic project* tersebut.

Politik Domestik dan Politik Memori dalam Konstruksi Neo-Ottomanisme Erdogan

Peneliti telah menyebutkan bahwa perumusan kebijakan luar negeri Turki tidak terlepas dari perdebatan kelompok identitas di tingkat domestik. Peneliti dalam hal ini menggarisbawahi yang dimaksud kelompok identitas di sini adalah kelompok yang menginstitutionalisasi persepsi identitas yang dikehendaki melalui partai politik. Oleh karena itu, diperlukan untuk memahami gambaran partai politik beserta basis ideologi yang digunakan. Pada pemilihan umum Juni 2018 yang diselenggarakan untuk memilih presiden serta anggota parlemen, AKP kembali memimpin jumlah kursi dalam parlemen. Berikut jumlah perolehan suara dalam kursi parlemen Turki. Posisi kedua setelah partai AKP diisi oleh partai berbasis nasionalis-Kemalisme, Partai Rakyat Republik (CHP) sedangkan partai ketiga diisi oleh partai oposisi AKP, yaitu Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang diisi oleh suara pro-minoritas, khususnya minoritas Kurdi. Penulis melihat bahwa posisi HDP yang berhasil menempati posisi tiga partai dengan suara terbanyak sebagai hal yang perlu diwaspadai oleh AKP.

Setelah Turki melakukan intervensi militer di wilayah Afrin, AKP kembali memimpin suara diikuti dengan perolehan suara partai CHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Turki menyukai narasi nasionalis-konservatif. Jika dielaborasi lebih lanjut, narasi mengenai “operasi” yang dilakukan secara gencar dengan alasan untuk membersihkan wilayah perbatasan Turki dan kawasan dari ancaman terorisme (YPG) menjadi narasi yang disukai oleh kelompok nasionalis dan konservatif. Lapisan masyarakat Turki dengan pandangan nasionalis dan konservatif pada praktiknya cukup banyak dan mendominasi dibanding dengan ideologi yang lain. Hal tersebut didukung dengan *public poll* yang dilakukan oleh Kadir Has University bahwa hampir 60-70 persen dari masyarakat merupakan konservatif, religius, dan nasionalis. Blok ideologi ini mendominasi Turki pada saat ini dan beberapa waktu ke depan (Yinanç 2017).

Memori kolektif dan praktik politiknya (politik memori) sebagai salah satu faktor pembentukan identitas nasional berfungsi sebagai alat legitimasi suatu negara untuk melakukan suatu tujuan politik. Selanjutnya, bagaimana politik memori tersebut digunakan dijelaskan oleh peneliti melalui penggunaan narasi masa lalu pada pidato atau pernyataan resmi pemerintah, retorika di depan publik maupun dalam pertemuan elit politik, media digital maupun elektronik, dan dalam diskusi publik. Memori historis berperan dalam pembentukan identitas nasional Turki yang memengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Peneliti mengutip pernyataan Erdogan dalam pidato yang disampaikan pada acara *Symposium on Our Archives’ Development, Vision and Contributions to Historical Research*:

“Archives are the memory of a nation and a state,” President Erdoğan pointed out during his speech, and added: “Nations without memories cannot know where they come from, where they are today and where they are headed to...The greatest foundations of this very state tradition and our history in the lands we live in are historical works and our rich archive. Particularly the Ottomans were one of the top states that kept records well and protected them (Presidency of the Republic of Turkey, 2019).”

Peneliti menemukan terdapat tiga memori kolektif yang memengaruhi Turki melakukan intervensi, yaitu politik memori Turki sebagai negara besar, memori interaksi Turki dengan kekuatan luar yang secara spesifik ditunjukkan melalui *Sevres Syndrome*, serta memori sebagai pemimpin dalam “Muslim World.” Politik memori Turki sebagai negara besar ditemukan peneliti melalui dibawakannya kembali narasi National Pact pada pemerintahan Erdogan. Sebelum operasi militer *Olive Branch*, Turki sebelumnya juga telah melakukan intervensi ke wilayah Suriah yang disebut

dengan *Operation Euphrates Shield* dan berlangsung sejak 2016-2017. Dalam periode tersebut, Presiden Erdogan dalam pidatonya membahas mengenai wilayah kedaulatan Turki yang merujuk pada *National Pact* 1920 (Zürcher 2018). Pada *National Pact* dijelaskan mengenai batas wilayah Turki yang berbeda dengan batas wilayah yang secara resmi diakui oleh komunitas internasional.

National Pact 1920 sendiri muncul pada masa Perang Kemerdekaan Imperium Ottoman yang menegaskan bahwa Ottoman merupakan suatu bangsa besar yang terdiri dari bangsa Turki, Kurdi, serta Anatolia. Narasi tersebut diciptakan untuk mencegah gejala self-determination bangsa Kurdi. Selain itu, *National Pact (Misak-i Milli)* juga merupakan dasar penentuan batas-batas nasional yang diadopsi oleh parlemen terakhir Ottoman pada Februari 1920. Batas-batas tersebut bersifat politis karena disusun berdasarkan kepentingan elit politik serta militer Ottoman dan diajukan sebagai tuntutan atau klaim wilayah oleh Ottoman kepada Barat.

Kedua, digunakannya kembali istilah Sevres Syndrome yang biasa digunakan sebagai sebuah memori mengenai dampak *Treaty of Sevres* tahun 1920 dalam pembangunan nasionalisme masyarakat Turki (Jung 2003). Semua sisi dalam spektrum politik Turki menjadikan perjanjian tersebut sebagai sebuah rujukan saat menyatakan bahwa kekuatan eksternal ingin melemahkan dan menghancurkan Turki. Jika dilihat dari sejarah Turki, rujukan terhadap dampak *Treaty of Sevres* muncul sejak terjaidnya serangkaian pemberontakan bangsa Kurdi. Aksi Kurdi dipandang terhubung dan diprovokasi oleh Inggris. Narasi tersebut dibawa oleh Presiden Erdogan dalam pidatonya di sebuah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Urusan Agama mengajak audiens untuk menjadikan Suriah sebagai contoh konsekuensi dari pengaruh kekuatan eksternal dan sedang merencanakan agenda untuk menarget Turki. Presiden Erdogan juga menyebutkan bahwa PKK dan FETO (*Gülen movement*) digunakan oleh kekuatan eksternal tersebut untuk menciptakan insekuritas di Turki (TRT World 2017).

Ketiga, yaitu memori sebagai pemimpin dalam *Muslim world* ditunjukkan dengan pernyataan Erdogan dalam pertemuan para pejabat agama provinsi yang dikutip oleh media massa cetak Islamis pro-Erdogan, Yeni Safak, “*The only country that can lead the Muslim world...Turkey, with its cultural wealth, accretion of history and geographical location, has hosted diverse faiths in peace for centuries, and is the only country that can lead the Muslim world (Ahvalnews 2018).*” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa narasi mengenai kemampuan dan tanggung jawab Turki dalam memimpin negara-negara Muslim dibawakan pada saat sekarang.

Kesimpulan

Social distance yang dipenuhi oleh disosiasi Turki terhadap kelompok etnis Kurdi serta respons *other* yang berupa resistensi menimbulkan insecurities pada identitas inklusif dan menguatnya identitas eksklusif Turki menggambarkan hubungan antara Turki dengan Kurdi, khususnya PKK diisi oleh representasi ancaman. *Othering* Turki terhadap Kurdi direfleksikan ke dalam kebijakan Turki terhadap Suriah sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan lokal dan daerah otonomi yang dikelola oleh kelompok Kurdi PYD dan YPG. Perang Sipil Suriah telah menciptakan insecurities terhadap identitas inklusif Turki yang mendorong nilai-nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan keadilan sosial. Suriah yang menempatkan YPG dan PYD sebagai aktor yang berperan penting dalam melawan ISIS dan menguatnya daerah kontrol PYD dan YPG menciptakan pandangan bahwa pemerintah Suriah berdiri di sisi terorisme, sehingga interaksi Turki dalam merespons pergerakan PKK di Turki direfleksikan dalam kebijakannya terhadap Suriah, yaitu membendung kekuatan YPG dengan kekuatan militer melalui YPG.

Intervensi Suriah menjadi bukti konsistensi Presiden Erdogan dalam memelihara ide konservatisme sekaligus menghimpun kalangan nasionalis. Dengan demikian, dari laporan penelitian ini, temuan peneliti yaitu pertama, hubungan *othering* Turki terhadap kelompok Kurdi menyebabkan Turki memandang gerakan YPG sebagai suatu ancaman dan intervensi merupakan cara Turki dalam merespons gerakan kelompok bersenjata Kurdi yang sesuai dengan interaksi Turki dengan Kurdi Turki. Kedua, intervensi Turki merupakan bagian dari politik memori Turki untuk merekonstruksi neo-Ottomanisme yang baru yang mengimplikasikan Turki yang (1) memimpin *Muslim world* (2) penanggung jawab keamanan negara-negara yang merupakan bagian dari Imperium Ottoman (3) berani melawan ancaman “kekuatan eksternal” (4) lebih cenderung mendekati diri dengan wilayah Arab dibandingkan dengan Barat.

Referensi:

Buku

- Bağcı, Hüseyin dan Şuay Nilhan Açıklan. 2015. *From Chaos to Cosmos: Strategic Depth and Turkish Foreign Policy in Syria* (Ankara: Springer International Publishing)
- Barnett, Michael N. 1996. “Identity: Alliance in the Middle East,” dalam *The Culture of National Security* (New York: Columbia University Press): 411

- Bayir, Derya. 2014. "The role of the judicial system in the politicide of the Kurdish opposition," *The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation*. Abingdon: Routledge
- Bozdaglioglu, Yucel. 2003. *Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach*. New York & London: Routledge
- Göktaş, Hidir. 1991. *Kürtler: İsyân-Tenkil*. (İstanbul: Alan Yayıncılık).
- Grigoriadis, Ioannis N. 2009. "Turkish National Identity," *Trials of Europeanization: Turkish Political Culture and the European Union* (Palgrave Macmillan US)
- Hopf, Ted. 2002. *Social Construction Of International Politics: Identities & Foreign Policies*. New York: Cornell University Press
- Jackson, Patrick Thaddeus dan Joshua S. Jones. 2017. "Constructivism." *Introduction to International Relations*. Cambridge University Press
- Wang, Zheng. 2018. *Memory Politics, Identity and Conflict: Historical Memory as a Variable*. Palgrave
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Jurnal**
- Fadaee, Simin dan Camilla Brancolini. 2019. "Exploring the shift in the Kurdish liberation movement in Turkey," *Ethnicities*. (Manchester: Sage Publication)
- Gourlay, William. 2018. "The Kurds and the "Others": Kurdish Politics as an Inclusive, Multi-ethnic Vehicle in Turkey," dalam *Journal of Muslim Minority Affairs Volume 38*
- Rumelili, Bahar. 2004. "Constructing Identity and Relating to Difference: Understanding the EU's Mode of Differentiation," dalam *Review of International Studies, Vol. 30, No. 1*. Cambridge University Press
- _____. 2012. "Liminal Identities and Processes of Domestication and Subversion in International Relations," *Review of International Studies*, 38 (2) pp. 495-508.
- Tezcur, Gunes Murat. 2010. "When Democratization Radicalizes: The Kurdish Nationalist Movement in Turkey," *Journal of Peace Research*, vol. 47, pp. 775: 789.
- Van Bruinessen, Martin. 2003. "Ehmedî Xanî's Mem û Zîn and Its Role in the Emergence of Kurdish Nationalist Awareness", dalam *Essays on the Origins of Kurdish Nationalism* (2003)

Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics." *International Organization*, Vol. 46, No. 2 pp. 391-425

White, Paul J. 1999. "Citizenship Under the Ottomans and Kemalists: How the Kurds were Excluded," *Citizenship Studies*, 3: 1 (Melbourne: Routledge)

Yavuz, M. Hakan. 2001. Five Stages of the Construction of Kurdish Nationalism in Turkey, dalam *Nationalism and Ethnic Politics*. Routledge

Situs Daring

Ahvalnews. 2018. "Only Turkey can lead Muslim world, says Erdoğan," <https://ahvalnews.com/islam/only-turkey-can-lead-muslim-world-says-erdogan>
Diakses pada 18 Juni 2019

Bilgic, Ali. 2016. "The Kurdish Question of Turkey's Foreign Policy," <https://www.e-ir.info/2016/03/02/the-kurdish-question-of-turkeys-foreign-policy/> Diakses pada 18 April 2019

Mandıracı, Berkay. 2016. "Turkey's PKK Conflict: The Death Toll," International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-pkk-conflict-death-toll>. Diakses pada 20 April 2019

Soguel, Dominique. 2016. "Residents Return to Turkish Town of Cizre, Find It Destroyed," <http://abcnews.go.com/International/wireStory/turkey-rolls-back-curfew-kurdish-town-37327505> Diakses pada 15 Juli 2019

TRT World and Agencies. 2017. "Erdogan says external powers aim to divide Turkey using terror groups," <https://www.trtworld.com/turkey/erdogan-says-external-powers-aim-to-divide-turkey-by-terror-groups-416133> Diakses pada 15 Juni 2018

Yinanç, Barçın. 2017. "Conservative, religious, nationalist' bloc to dominate Turkey's future," <http://www.hurriyetdailynews.com/conservative-religious-nationalist-bloc-to-dominate-turkeys-future-108846> Diakses pada 15 Juni 2019

Situs Resmi

Presidency of the Republic of Turkey: Directorate of Communications. 2019. "We see that those who attempt to lecture us on human rights over the Armenian issue themselves have a bloody past," <https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/we-see-that-those-who-attempt-to-lecture-us-on-human-rights-over-the-armenian-issue-themselves-have-a-bloody-past>. Diakses pada 13 Mei 2019

Presidency of the Republic of Turkey. 2019. "The PKK/PYD's so-called fight against DAESH is nothing but an out-and-out lie," Tersedia di <https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/100469/-the-pkk-pyd-s-so-called-fight-against-daesh-is-nothing-but-an-out-and-out-lie-> Diakses pada 13 Juni 2019

Report

Human Rights Watch. 2019. "World Report 2019: Turkey," <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey> Diakses pada 14 Juli 2019